

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PASAR KULINER (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe)

Lisa Iryani

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *lisa.iryani@unimal.ac.id*

ABSTRAK

Pasar Kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa merupakan salah satu pasar kuliner yang dibangun oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dimana pengelolaannya merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe. Kondisi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa sendiri masih belum berfungsi secara optimal sejak pertama kali dibangun pada tahun 2011, sehingga yang perlu dilihat di sini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dari pasar kuliner tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan serta keberlanjutan program dari pasar kuliner taman stadion tunas bangsa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dikaji secara deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa masih sebatas akuntabilitas reguler yang pertanggungjawabannya berupa laporan pemasukan retribusi dari pasar kuliner tersebut oleh Disperindagkop. Selain itu juga terjadi miskomunikasi antara pihak disperindagkop dan pedagang setempat. Kelanjutan dari pasar kuliner taman stadion tunas bangsa kedepannya difokuskan pada optimalisasi fungsi dari pasar kuliner tersebut sebagai tempat berwisata kuliner bagi masyarakat kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Pasar Kuliner

A. PENDAHULUAN

Pasar sebagai salah satu sarana publik yang dibangun Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang (Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar) yang

dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang taraf hidupnya, kemudian pasar juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan produktivitas (pendapatan) daerah.

Ada beberapa jenis pasar yang terdapat di kota Lhokseumawe di antaranya; pasar ikan merupakan pasar yang dibangun sebagai tempat transaksi jual beli ikan, pasar buah merupakan pasar yang dibangun sebagai tempat transaksi jual beli buah-buahan, pasar kuliner merupakan pasar yang dibangun sebagai tempat transaksi jual beli dalam bentuk makanan atau jajanan, dengan kata lain pasar kuliner merupakan tempat transaksi barang-barang yang berupa olahan makanan dan minuman dari penjual kepada pembeli.

Tabel I.I

Jumlah Pasar Kuliner Kota Lhokseumawe

No.	Nama Bangunan	Jumlah Kios	Luas	Keterangan
1.	Kios Pasar Kuliner KP3			
	1. Blok 1	8	2x2 M	
	2. Blok 2	4	2x14 M	
	3. Blok 3	8	2x2 M	
2	Kios Pasar Kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa			
	1. Kios Kuliner Bundar	20	3x2,5 M	
	2. Kios Area Jogging Track	22	2x4 M	
3	Kios Kuliner Bantaran Sungai Cunda	4	3x3 M	
4	Kios Kuliner Taman Sp. Legos	2	3x3 M	

Sumber: diolah penulis 11 Agustus 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat empat pasar kuliner yang berada di kota Lhokseumawe dengan jumlah kios keseluruhan sebanyak 68 kios. Keseluruhan pasar kuliner di atas merupakan sarana/ fasilitas pelayanan

publik yang wajib dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui dinas terkait secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara wajib mengelola sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan, dan dapat diakses masyarakat secara mudah.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik telah disebutkan bahwa dalam mengelola sarana pelayanan publik sebagai upaya pelestarian pembangunan dibutuhkan akuntabilitas dari pihak penyelenggara. Akuntabilitas di sini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* (dalam Sedarmayanti, 2009:104) akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Deklarasi Tokyo 1985 (dalam Sedarmayanti, 2009:105) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Di kota Lhokseumawe masih terdapat sejumlah bangunan pasar milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dana miliaran rupiah namun bangunan-bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai dan bahkan sebagian belum digunakan sama sekali. Kondisi pasar kuliner yang dibangun dengan menggunakan APBN dan APBD tersebut menunjukkan kurangnya peran aktif pemerintah dalam mengawasi dan mengelola pasar kuliner tersebut, baik yang berada di simpang legos maupun pasar kuliner di komplek taman stadion tunas bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya fasilitas pasar kuliner simpang legos mengalami kerusakan, antara lain kerusakan pada lampu dan pagar.

Kemudian kondisi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa walaupun tidak banyak mengalami kerusakan tetapi pasar ini belum dioptimalkan fungsinya oleh pemerintah, dilihat dari masih banyaknya kios yang kosong sehingga fasilitas publik tersebut tampak semak dipenuhi dengan rumput yang panjang dan menunjukkan keadaan bahwa pasar kuliner taman stadion tunas bangsa tidak dikelola oleh pemerintah dengan baik.

Pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi sebagai penyelenggara pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi mempunyai tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi sebagaimana disebutkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Namun kondisi riil menunjukkan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan anggaran terkesan parsial dan tidak mengedepankan akuntabilitas kepada publik terutama akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas program, dimana suatu kebijakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam wujud pembangunan sarana publik tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan tidak memiliki keberlanjutan program. Dapat dilihat bahwa program pembangunan pasar kuliner tunas bangsa kota Lhokseumawe tidak memiliki fungsi yang jelas, dimana masih terdapat pedagang liar yang membuka lapaknya sendiri di area jalan Stadion Tunas Bangsa kota Lhokseumawe. Sehingga tujuan pemerintah untuk membangun pasar kuliner tersebut dapat dikatakan tidak tercapai, hal ini dikarenakan kurangnya peran aktif pemerintah dalam mengelola pasar kuliner taman stadion tunas bangsa tersebut.

Apabila masalah-masalah seperti ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan maka akan berdampak buruk bagi pembangunan kota Lhokseumawe, dimana pasar kuliner taman stadion tunas bangsa yang dibangun dengan menggunakan anggaran daerah tersebut menghabiskan dana yang fantastis dan cukup besar, sehingga diperlukan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pasar kuliner taman stadion tunas bangsa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pembangunan tersebut agar penggunaan kebijakan anggaran yang telah dibuat lebih efektif dan efisien.

Agar pembangunan yang telah dilakukan dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah melalui dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan di pasar kuliner kota Lhokseumawe dengan cara

membuat program-program yang berkelanjutan karena pasar kuliner yang telah dibangun pemerintah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan anggaran daerah atau APBD, tersebut merupakan aset daerah Kota Lhokseumawe yang apabila dikelola dengan baik dan benar akan memberikan manfaat bagi pembangunan kota Lhokseumawe dan mampu meningkatkan pendapatan kota Lhokseumawe. Untuk itu dibutuhkan akuntabilitas dari semua pihak yang terkait terhadap pengelolaan pasar kuliner tersebut sehingga manfaatnya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah (PAD) kota Lhokseumawe.

B. METODE PENELITIAN

Metode Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi di Kota Lhokseumawe.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan atau kejadian melalui proses berfikir induktif (dalam Suwandi 2008:1). Penelitian ini dikaji dengan cara mendeskripsikan, menganalisis serta menggambarkan sesungguhnya permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kalimat sehingga penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang terkait. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan pasar kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe.

Informan Penelitian

Dalam menetapkan informan penelitian ini yang penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Narbuko dan Ahmadi (2010:116) teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Adapun informan yang diwawancarai penulis meliputi :

1. Bapak Halimuddin, SE., AK., MSP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe
2. Bapak Muniruddin, S.Sos., MSM selaku Kepala Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal Disperindagkop Kota Lhokseumawe.
3. Ibu Nining Salina, S.STP., MSM selaku Kepala Bidang Retribusi Dispenda Kota Lhokseumawe.
4. Bapak M. Hasbi, S.Sos selaku Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Lhokseumawe
5. Ibu Muni Isnanda, SH selaku Kasi Pembinaan Pengembangan Seni Budaya dan Sejarah, Nilai Tradisional, Museum Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
6. Dodi Arianto selaku Pedagang setempat.

Informan yang telah ditentukan penulis anggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer “merupakan sumber utama, yang di peroleh melalui kata-kata (wawancara) dan tindakan dari sumber pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) yang dilakukan secara sadar, terarah dan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan”.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder “merupakan sumber data tambahan yang di peroleh peneliti melalui sumber tertulis, dokumentasi, foto dan data statistik yang mendukung berhasilnya sebuah penelitian”. Penulis memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data yang ada berupa arsip dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian. (Widi, 2009:235)

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dan data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observation*)

Menurut Rianto Adi (2004:70) observasi adalah mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan atau pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan

selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan dan mencatat langsung hasil observasi/ pengamatan yang ditemukan di lokasi penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Burhan Bungin (2007:108) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*indept interview*). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada aparaturnya yang terkait untuk mendapatkan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kota Lhokseumawe, Kepala Bidang Retribusi Dispenda Kota Lhokseumawe, Komisi C DPR Kota Lhokseumawe, Kasi Pembinaan Pengembangan Seni Budaya dan Sejarah, Nilai Tradisional, Museum Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. dan pedagang yang berjualan di badan jalan area pasar kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pasar kuliner Kota Lhokseumawe.

Teknik Analisis Data

Proses penelitian dengan menggunakan model analisis interaktif yang menurut Moleong (2005:5) melalui empat tahap pengumpulan data, adalah :

- 1) Koleksi data, yaitu mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan.
- 2) Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang terpenting.
- 3) Penyajian data, penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, pada penelitian kualitatif verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Melakukan verifikasi (penafsiran ulang) terhadap kesimpulan-kesimpulan guna menghindari kesalahan interpretasi data dan mematangkan hasil yang diperoleh.

C. PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Pasar Kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe

Akuntabilitas manajerial terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik yang ada. Akuntabilitas manajerial sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu mempertanggungjawabkan suatu program pembangunan yang telah dibuat melalui pengelolaan yang baik. Pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan fisik bangunan dan pengelolaan fungsi bangunan. Pengelolaan fisik bangunan merupakan upaya pemerintah untuk mengelola fisik bangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dalam mempertahankan kelestarian bangunan yang dilakukan melalui perawatan fisik bangunan dan lingkungan sekitar pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe. Pengelolaan fungsi bangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe merupakan upaya pemerintah untuk memfungsikan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe yang dimulai dari inventarisasi kebutuhan sampai pada tahap penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Tujuan dari pemeliharaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua fasilitas yang

tersedia agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe merupakan tanggung jawab pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) yang sejak pertengahan tahun 2016 dialihkan kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) dalam pengelolaan retribusinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe masih sebatas akuntabilitas tradisional/reguler kepada pihak legislatif yang ditunjukkan melalui laporan pertanggungjawaban hanya sebatas pertanggungjawaban pemasukan retribusi dari pasar kuliner tersebut yang dilakukan oleh Disperindagkop.

Dalam mengelola fungsi bangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa pihak disperindagkop hanya sebatas memberikan himbauan kepada masyarakat agar mau memanfaatkan pasar kuliner yang telah disediakan, sementara itu pemerintah juga membangun kios yang berada dekat dengan kios bundar pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, kios yang dibangun berlokasi di pinggir jalan stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, sehingga pedagang lebih memilih untuk berjualan di kawasan tersebut yang mengakibatkan kios kuliner bundar yang telah dibangun tidak ada yang menempatinnya.

Fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian yaitu pengelolaan pasar kuliner masih belum optimal yang ditunjukkan dari pemanfaatan pasar kuliner tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan benar, dimana pasar kuliner yang telah disediakan pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pasar kuliner taman stadion tunas bangsa tersebut kosong dan terbengkalai. Fenomena

yang terjadi di pasar kuliner taman stadion tunas bangsa ini disebabkan karena pemerintah membangun kios area *jogging track* yang letaknya lebih strategis dibanding kios bundar, sehingga mengakibatkan daya tarik pembeli lebih tinggi di kios area *jogging track* dan para pedagang memilih untuk berjualan di kawasan tersebut, karena kios area *jogging track* sudah penuh mengakibatkan banyak pedagang yang membuat lapak ilegal di sepanjang jalan stadion tunas bangsa tersebut.

Selain itu terjadi kesalahpahaman antara pihak Disperindagkop dan juga pedagang setempat. Di satu sisi pihak Disperindagkop beranggapan bahwa masyarakat pedagang lah yang tidak mau menempati kios kuliner bundar yang telah disediakan, di sisi lain para pedagang tetap berjualan di pinggir jalan dan bahkan membuat lapak ilegal dikarenakan tidak adanya paksaan, ketegasan, maupun *punishment* dari pihak Disperindagkop untuk menertibkan mereka.

Sementara di samping itu pemerintah (Disperindagkop) selaku penyedia pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe memiliki hak otoritatif untuk memaksa masyarakat mengikuti aturan yang ada dalam melaksanakan tugasnya, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil penelitian ini setidaknya ada empat aspek yang menyebabkan pengelolaan fungsi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe tidak optimal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya komitmen dari pihak Disperindagkop untuk melakukan pengelolaan agar pelaksanaan misi akuntabel, hal ini dapat dilihat dari

tindakan pemerintah dalam membangun kios di area *jogging tract* yang juga merupakan salah satu penyebab tidak berfungsinya kios kuliner bundar.

- 2) Tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pihak Disperindagkop dan masyarakat pedagang sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak tersebut.
- 3) Tidak adanya penetapan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, hal ini dapat dilihat dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa sejak pertama dibangun sampai sekarang pihak disperindagkop hanya sebatas memberikan himbauan saja kepada masyarakat untuk memanfaatkan pasar kuliner tersebut.
- 4) Tidak adanya orientasi pencapaian visi, misi, hasil, dan manfaat dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, hal ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang dilakukan hanya sebatas pertanggungjawaban pemasukan saja.

Menurut pengamatan penulis, akuntabilitas pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa masih sebatas akuntabilitas reguler dimana pertanggungjawabannya dilakukan hanya melalui laporan pertanggungjawaban pemasukan retribusi pasar kuliner tersebut. Pemerintah disini seharusnya mampu menarik minat masyarakat untuk berjualan dan berkunjung di kios bundar pasar kuliner tunas bangsa dengan meningkatkan promosi dari pasar kuliner taman stadion tunas bangsa kepada masyarakat. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menyikapi dan memberantas lapak ilegal di kawasan pasar kuliner tersebut.

Selain itu pemerintah juga dapat membuat suatu kebijakan relokasi pasar bagi para pedagang makanan kaki lima yang terdapat di Kota Lhokseumawe untuk dialihkan ke pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, selain dapat mengoptimalkan fungsi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa juga dapat memperluas dan memperindah ruang dan tata Kota Lhokseumawe.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program merupakan langkah untuk melihat apakah tujuan dari program pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dapat tercapai atau tidak. Sehingga menggambarkan pertanggungjawaban pemerintah dari segi program yang telah dibuat.

Pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pasar yang layak dan juga untuk menghindari kawasan yang kumuh. Dengan dibangunnya pasar kuliner taman stadion tunas bangsa, seharusnya tidak ada lagi kawasan kumuh di sekitar pasar tersebut, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak lapak-lapak ilegal yang dibangun oleh pedagang di kawasan pasar kuliner tersebut, sedangkan kios bundar pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe yang disediakan oleh pemerintah juga belum terisi penuh dan belum difungsikan secara optimal.

Dengan demikian, tujuan daripada pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe belum tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sejak dibangun pada tahun 2011, karena sampai saat ini belum berfungsi secara optimal. Dengan demikian pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe belum dapat memberikan dampak sebagaimana mestinya, baik bagi masyarakat maupun daerah.

Dengan dibuatnya kebijakan pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe seharusnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pasar kuliner juga seharusnya dapat bermanfaat bagi daerah, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusinya, namun pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe belum berdampak sebagaimana mestinya yang juga ditunjukkan dari realisasi anggarannya belum tercapai.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe pihak Disperindagkop berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) Kota Lhokseumawe untuk membangun sebuah panggung seni di kawasan pasar kuliner tersebut sebagai alternatif program dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa.

Alternatif program tersebut merupakan satu upaya pemerintah untuk menarik minat masyarakat untuk menyewa maupun berkunjung ke pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe. Akuntabilitas program pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dilaksanakan pemerintah melalui upaya dengan membuat program alternatif agar pasar kuliner taman stadion

tunas bangsa Kota Lhokseumawe dapat dioptimalkan fungsinya sebagaimana mestinya. Alternatif program ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari program sebelumnya, yaitu pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe.

Menurut pengamatan penulis alternatif program yang dibuat oleh pihak Disperindagkop yang berkoordinasi bersama dengan Dithubparbud Kota Lhokseumawe merupakan suatu langkah baik untuk mengoptimalkan fungsi bangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa, dengan adanya program pembangunan panggung seni ini artinya pemerintah sudah membuat satu inovasi dalam melaksanakan tugas optimalisasi fungsi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa karena pemerintah tidak hanya membuat suatu kebijakan pembangunan pasar, menyediakan kios, tetapi pemerintah juga menyediakan fasilitas/sarana yang dapat menunjang tujuan dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa tersebut.

Agar pasar kuliner taman stadion tunas bangsa dapat berfungsi secara optimal, maka dengan adanya pembangunan panggung seni tersebut pemerintah seharusnya dapat membuat suatu program yang dapat menampilkan berbagai macam kesenian daerah melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta pegiat seni yang ada di Kota Lhokseumawe. Program yang dibuat juga harus komprehensif, dengan demikian masyarakat pedagang maupun pembeli memiliki ketertarikan untuk datang dan berkunjung ke kawasan taman stadion tunas bangsa tersebut, sehingga dengan demikian pemfungsian pasar kuliner taman stadion tunas bangsa juga dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Disini pemerintah harus lebih aktif dan tegas dalam menjalankan tugasnya untuk mengoptimalisasi fungsi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dengan mengamankan para pedagang yang berjualan menggunakan lapak ilegal, pemerintah harus membuat satu bentuk *punishment* terhadap para pedagang yang tidak mau mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, jangan sampai di satu sisi pemerintah membangun pasar kuliner tetapi di sisi lain membiarkan pertumbuhan lapak-lapak ilegal di kawasan pasar kuliner tersebut. Pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan sebuah pembangunan pasar harusnya melakukan observasi yang lebih mendalam mengenai bentuk, jumlah, dan lokasi yang dibutuhkan agar pembangunan pasar dapat bermanfaat.

Keberlanjutan Pengelolaan Pasar Kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe

Pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe merupakan program pembangunan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe melalui pemasukan retribusi pasar kuliner taman stadion tunas bangsa tersebut.

Suatu program pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak cukup hanya dengan membangun gedung saja, tetapi program pembangunan tersebut juga harus mampu dijaga kelestariannya baik dari aspek fisik bangunan maupun fungsi bangunan. Untuk itu dibutuhkan keberlanjutan program (*sustainablility*) dari suatu pembangunan yang dalam hal ini adalah pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan antara pihak Pemo Lhokseumawe dengan DPRK Lhokseumawe maka diputuskan bahwa Pasar kuliner taman stadion

tunas bangsa Kota Lhokseumawe kedepannya akan terus dilanjutkan dengan mengingat bahwa pasar kuliner tersebut merupakan kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan program dari pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe difokuskan pada optimalisasi fungsi dari pasar kuliner tersebut sebagai tempat berwista kuliner bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. Setelah pemfungsian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian pihak Disperindagkop baru dapat membuat program-program pengembangan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa kedepannya.

Selain itu di kawasan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe juga sedang dibangun panggung seni oleh Dishubparbud Kota Lhokseumawe yang berkoordinasi dengan Dipserindagkop Kota Lhokseumawe, pembangunan panggung seni ini diharapkan oleh pihak Disperindagkop dapat menarik minat masyarakat Kota Lhokseumawe untuk datang ke pasar kuliner, sehingga pemfungsian pasar kuliner tersebut dapat dipercepat.

Dari hasil temuan dan pengamatan penulis, untuk mencapai tujuan dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe, pihak Disperindagkop tidak memiliki program khusus, Disperindagkop hanya sebatas memberikan himbuan kepada masyarakat untuk menyewa kios yang tersedia di pasar kuliner tersebut. Selain itu, sebenarnya tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya upaya sosialisasi dari pihak Disperindgkop untuk mempromosikan pasar kuliner tersebut, bahkan tidak terdapat penanda untuk menandakan bahwa bangunan merupakan pasar kuliner

yang dapat dimanfaatkan masyarakat baik untuk berjualan maupun untuk berwisata kuliner.

Seharusnya pihak Disperindagkop mampu membuat suatu program yang mendukung eksistensi dari pasar kuliner taman stadion tunas bangsa Kota Lhokseumawe dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak untuk membuat *event-event* seperti membuka *stand* pameran kuliner yang dapat mempromosikan keberadaan pasar kuliner tersebut dan mengangkat citra kuliner yang ada di Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian akuntabilitas pemerintah baik dari segi manajerial maupun program dapat tercapai.

D. PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa yang dilakukan saat ini masih sebatas akuntabilitas reguler kepada pihak legislatif yang dilaksanakan melalui pertanggungjawaban pemasukan retribusi dari pasar kuliner tersebut oleh Disperindagkop. Selain itu terjadi miskomunikasi antara pihak Disperindagkop dan pedagang setempat. Di satu sisi pihak Disperindagkop beranggapan bahwa masyarakat pedagang lah yang tidak mau menempati kios kuliner bundar yang telah disediakan, sementara di sisi lain para pedagang juga tetap berjualan di pinggir jalan dan bahkan membuat lapak ilegal dikarenakan tidak adanya paksaan, ketegasan, maupun *punishment* dari pihak Disperindagkop untuk menertibkan mereka.

Keberlanjutan pengelolaan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa kedepannya dilaksanakan dengan fokus pada optimalisasi fungsi dari pasar kuliner tersebut sebagai tempat berwisata kuliner bagi masyarakat Kota Lhokseumawe yang ditetapkan melalui hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pihak

pemerintah kota kepada pihak legislatif daerah. Setelah pemfungsian pasar kuliner taman stadion tunas bangsa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian pihak Disperindagkop baru dapat membuat program-program pengembangan pasar kuliner tersebut. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan pasar kuliner taman stadion tunas bangsa, pihak Disperindagkop sebenarnya tidak memiliki program khusus, pihak Disperindagkop hanya sebatas memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyewa kios yang tersedia di pasar kuliner tersebut, sehingga pemfungsian pasar kuliner taman stadion tunas bangsa masih bergantung pada kehendak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Didin S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan; Teori Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Kasumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan public*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Ixey J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaj Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Arifin. (2008). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Sumatera Utara: Fisip Usu Press.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedarsono, Nani. (2003). *Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Persada Grafika.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik; teori, konsep, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat